

# BAB I PENDAHULUAN

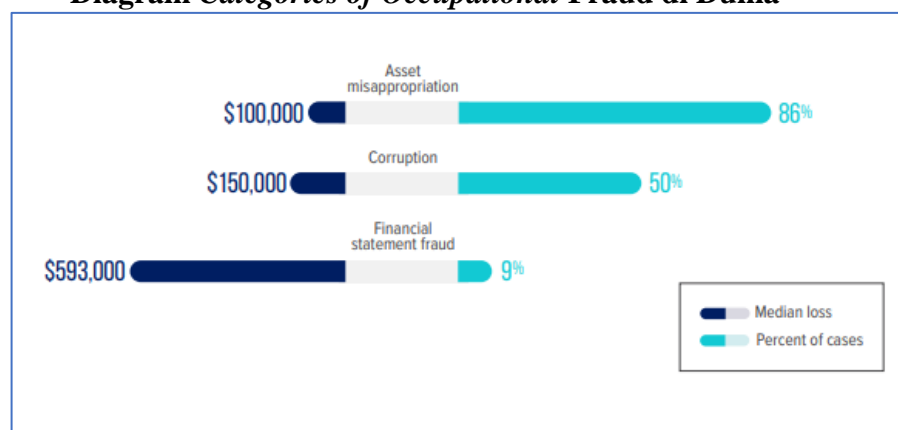
## 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan suatu perusahaan biasanya akan diterbitkan pada periode waktu yang sudah ditentukan. Perusahaan akan mengusahakan menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan kondisi operasional dan keuangan perusahaan berada dalam posisi prima. Menurut PSAK No.1, Laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang rinci dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil tindakan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi membutuhkan laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAK) menurut ketentuan Ikatan Akuntansi Indonesia. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu mengetahui baik atau buruknya suatu kinerja keuangan dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengambil keputusan perlu melakukannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan. Pada hakekatnya kegagalan beberapa perusahaan karena disebabkan tidak tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Demi menutupi kegagalan tersebut tidak sedikit manajemen melakukan berbagai macam cara untuk menutupi kegagalan yang dialami dengan melakukan berbagai kecurangan (*fraud*) (Ansori & Fajri, 2018).

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan kecurangan merupakan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh pribadi, manajer atau manajemen yang mengetahui bahwasanya kekeliruan tersebut memberikan dampak negative kepada pengguna laporan keuangan, orang pribadi, manajemen, ataupun pihak lain. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggolongkan *fraud* menjadi 3 (tiga) jenis, penggolongan ini disebut "*fraud tree*". Korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan kecurangan

laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) merupakan cabang dalam *fraud tree*) (TuanaKotta, 2018). SAS (*Statement of Auditing Standard*) No.99 menyebutkan bahwa kecurangan pelaporan keuangan adalah perbuatan kelalaian yang disengaja dan memberikan dampak dalam laporan keuangan. Skema kecurangan laporan keuangan, di mana pelakunya dengan sengaja menyebabkan salah saji atau memanipulasi fungsi pengeluaran atau pemasukan dalam laporan keuangan organisasi untuk tujuan tidak jujur, misalnya membeli barang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi (ACFE, 2022).

**Gambar 1. 1**  
**Diagram Categories of Occupational Fraud di Dunia**



Sumber: Association of Certified Fraud Examiners tahun 2022

Gambar 1.1 terdapat 3 (tiga) kategori utama kecurangan dalam pekerjaan yaitu penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Kasus yang paling banyak adalah penyalahgunaan asset, kasus ini melibatkan karyawan yang mencuri atau menyalahgunakan sumber daya pemberi kerja. Penyalahgunaan asset terjadi 86% dalam kasus ini, tapi kasus ini cenderung mengakibatkan kerugian dengan rata-rata terendah yaitu USD 100.000/Rp 1,56 Miliar. Kategori kedua adalah korupsi, kasus ini meliputi penyuapan, konflik kepentingan dan pemerasan. Kasus ini berada ditengah baik dari segi frekuensi maupun kerugian yang ditimbulkan. Korupsi terjadi pada 50% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar USD 150.000/Rp 2,33 Miliar. Kategori terakhir adalah kecurangan laporan keuangan, dimana para pelaku sengaja menghilangkan material atau menyebabkan salah saji

dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan. Kecurangan laporan keuangan terjadi paling sedikit yaitu 9% kasus tetapi memiliki kerugian yang paling besar yaitu USD 593.000/Rp 9,24 Miliar (ACFE, 2022).

Kasus kecurangan pada laporan keuangan yang di PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) yang merupakan perusahaan Sub Sektor Property, Real Estate, dan Konstruksi. PT Hanson International pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. OJK pun menjatuhkan sanksi, baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya, Benny Tjokro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (kasiba) dengan nilai gross Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, Hanson International melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). Karena rekayasa LKT tersebut, OJK menjatuhkan sanksi PT Hanson International Tbk dikenai denda sebesar Rp 500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara CEO PT Hanson International Benny Tjokro dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar (Idris, 2020).

Kasus lainnya adalah kecurangan yang dilakukan PT Bakrieland Developmet Tbk tahun 2013 tidak menyajikan kewajiban jangka panjang yang sebenarnya dalam laporan keuangan. PT Bakrieland Developmet Tbk memiliki hutang obligasi kepada Bank Of New York Mellon dan tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, PT Bakrieland Developmet Tbk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk melakukan rencana perdamaian kepada Bank Of New York Mellon sehubungan dengan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran hutang tersebut. Namun, PT Bakrieland Developmet Tbk tidak mengungkapkan masalah tersebut dalam laporan keuangannya, yang seharusnya masalah tersebut harus dilaporkan sebagai perusahaan yang terbuka. Menurut Nurhaida, selaku kepala eksekutif pengawas pasar modal menjelaskan bahwa bagi perusahaan terbuka harus mengungkapkan setiap masalah yang berpengaruh terhadap publik (Suryowati, 2013).

Maraknya kasus kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh banyak perusahaan, membuktikan rendahnya kualitas tata kelola perusahaan. Secara konsisten tata kelola perusahaan yang baik akan menimbulkan dampak perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholder*. (Nursiam & Ghaisani, 2021). Tata kelola perusahaan yang kurang kuat merupakan penyebab marak terjadinya kecurangan pada organisasi. Kecenderungan melakukan tindakan *fraud* lebih besar terjadi pada perusahaan dengan latar belakang yang didominasi oleh pihak dalam (*insider*) dan berkemungkinan besar tidak memiliki komite audit (Dechow et al., 1996). *Corporate governance* berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Pemicu terjadinya kecurangan laporan keuangan salah satunya karena lemahnya sistem korporasi dalam perusahaan (Priswita & Taqwa, 2019).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *esktern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dan berkaitan dengan tujuan pengelolaan perusahaan yang baik sehingga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (FGCI, 2001). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kecurangan (Oktaviani et al., 2019).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan pedoman umum *Good Corporate Governance* yang berisikan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya (Kisworo & Shauki, 2019). Beberapa perusahaan membongkar tata kelola,

memperkuat kekuatan pasar dengan cara menerapkan peraturan-peraturan yang lebih ketat dan berfokus pada transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Kelvianto & Mustamu, 2018). Tata kelola perusahaan merupakan faktor penting dalam pengendalian perusahaan, sehingga kegiatan di dalam perusahaan dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas tata kelola perusahaan yang baik diterapkan untuk semua aspek bisnis dan semua tingkat perusahaan (Sparta & Purnama, 2021). Pada hakekatnya terdapat berbagai cara dalam mencegah *fraud* antara lain dengan menerapkan kendali intern yang andal, menerapkan manajemen risiko, menerapkan *corporate governance*, dengan program *fraud control plan*, dan lainnya. Akan tetapi menerapkan *corporate governance* merupakan penerapan yang sudah pasti diterapkan di suatu perusahaan, dikarenakan *corporate governance* memiliki prinsip dasar yang mengembangkan kode etik dan untuk menghindarkan dari kejahatan yang bertentangan dengan hukum (Karyono, 2017).

Proksi *corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini antara lain dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Adanya Adanya pengawasan yang efektif dapat mengurangi kecurangan laporan keuangan (Shaqila, 2021). Komisaris Independen dalam suatu perusahaan bisa mempengaruhi manajemen dalam menghasilkan integritas laporan keuangan. Tujuan memiliki komisaris independen sebagai anggota dewan untuk memastikan pengambilan keputusan yang tidak bias untuk mencegah pengambilalihan pemegang saham minoritas (Kurniawan et al., 2020). Kepemilikan manajerial dapat mengurangi tindakan manajer yang melakukan kecurangan laporan keuangan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham (Smulowitz et al., 2019). Adanya pemantauan dari kepemilikan institusional terhadap manajemen akan mengurangi risiko terjadinya kecurangan. . Kegunaan dari komite audit adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan

adanya pengawasan dari komite audit yang efektif dapat memonitor sistem pengendalian internal dan mengurangi terjadinya kecurangan yang terjadi (Triyani et al., 2019).

Penelitian terdahulu yang telah banyak dilakukan mengenai tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki hasil yang beragam. Pada penelitian Kurniawan et al. (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan, hasil ini berbeda pada penelitian Shaqila (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan pencegahan terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian Kurniawan et al. (2020) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan penelitian Dwiputri & Soepriyanto (2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pelaporan keuangan. Proksi Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada penelitian Triyani et al. (2019) sedangkan pada penelitian Ismiyanti & Prastichia (2015) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian Priswita & Taqwa (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan tata kelola dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya pada Shaqila (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dalam meningkatkan tata kelola dalam mencegah kecurangan laporan. Penelitian Ohidoa-toluwa (2021) menjabarkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sebaliknya pada penelitian Wicaksono & Chariri (2015) komite audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Fenomena tidak konsistennya penelitian-penelitian terdahulu menjadi alasan bagi peneliti menganalisis kecurangan laporan keuangan dalam perspektif *corporate governance*. Populasi pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan di sektor *Property & real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021. Fokus penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh dari struktur *corporate governance* meliputi dewan komisaris, komisaris independen,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

**Gambar 1. 2**

***Top 5 Median Losses By Industry di Dunia***



*Sumber: Association of Certified Fraud Examiners tahun 2022*

Penelitian ini menjadikan perusahaan sektor *properties & real estate* yang terdaftar di BEI sebagai objek dalam penelitian. Berdasarkan gambar 1.2 yang menunjukkan 5 sektor perusahaan dengan kerugian terbanyak di dunia. Sektor perusahaan dengan kerugian paling besar adalah sektor *Real Estate* dengan kerugian USD 435.000/Rp 6,6 Miliar. Perusahaan skala besar yang memiliki karyawan dengan jumlah banyak berpotensi melakukan kecurangan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan skala kecil dengan jumlah karyawan sedikit (ACFE, 2022). Alasan lain peneliti memilih sektor *Property & real estate* yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian karena belum banyak penelitian yang dilakukan pada sektor ini, objek penelitian-penelitian terdahulu adalah sektor manufaktur. Sehingga peneliti lebih tertarik untuk memilih sektor ini dan untuk mengetahui kesimpulan yang lebih tepat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Priswita & Taqwa (2019). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada variable penelitian dan objek penelitian. Berdasarkan saran dari peneliti sebelumnya peneliti menambah variable komisaris independen untuk menggambarkan mekanisme *corporate governance* secara menyeluruh. Kemudian peneliti mengganti objek penelitian dan memperpanjang tahun penelitian menjadi perusahaan sektor *Property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Fenomena yang terjadi dan *research gap* di atas maka peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Sektor *Property & Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)**”

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan yaitu:

1. Apakah dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan yaitu:

1. Untuk menguji dan membahas pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan membahas pengaruh dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan membahas pengaruh komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.



4. Untuk menguji dan membahas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk menguji dan membahas pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk menguji dan membahas pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur dan wawasan dibidang khususnya pada bidang studi akuntansi yang meneliti mekanisme *corporate governance* terhadap pencegahan potensi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam meminimalisir dan mencegah tindakan kecurangan laporan keuangan untuk menghindari penyimpangan dalam studi teori keagenan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Meningkatkan nilai tambah struktur organisasi pengendalian dalam sistem pengendalian manajemen serta membentuk sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk menghindari terjadinya *fraud* pada perusahaan dalam rangka mempraktikkan *corporate governance* yang baik.
- b) Membantu perusahaan untuk memahami mekanisme *corporate governance* agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.
- c) Bahan acuan perusahaan-perusahaan agar mampu menyajikan laporan keuangan bebas dari kecurangan-kecurangan salah saji yang material.